



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TEBING TINGGI**



KATA PENGANTAR

Sebagai aplikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, agar membuat Renstra untuk jangka waktu 2023-2026

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan Daerah, kinerja, permasalahan dan tantangan, tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Renstra disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran dan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasarannya.

Tebing Tinggi, 28 Maret 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

ZUBIR HUSNI HARAHAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003



D A F T A R I S I

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
2.2	Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
3.2	Penentuan Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persatuan dan kesatuan bangsa yang dimanipestasikan kedalam suatu wawasan nasional yaitu merupakan cara pandang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan kondisi Sosial Budaya serta pemanfaatan konstelasi kekuatan masyarakat yang ada guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan mulai memudar setelah terjadinya berbagai perubahan sistem pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun 2023-2026. Didalam Renstra tersebut memuat tentang Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan SKPD. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi telah menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi 2023-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.

Adapun fungsi penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahann khususnya dalam kebijakan perencanaan pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam mendukung Tujuan Pemerintah Kota Tahun 2023-2026.



Adapun Tahapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi 2023-2026 sebagai berikut ;

- Persiapan Penyusunan
- Penyusunan Rancangan Awal
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan akhir dan
- Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi 2023-2026

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi 2023-2026 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kota Tebing Tinggi, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kota Tebing Tinggi. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan program dan kegiatan yang akan disusun nantinya bisa terarah dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditargetkan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 - 2022 adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005-2025;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan



- rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
 - h. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - i. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
 - l. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
 - m. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - n. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - o. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - p. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai acuan dan rujukan dalam Penyusunan Rencana Kerja selama Tahun 2023 - 2026, yang dalam penyusunannya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 yang merupakan acuan dan rujukan dalam



penyusunan kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan dan memberikan arahan dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026, sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerjasama dengan segenap komponen Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, OKP, LSM, Parpol dan lain – lain) yang mengutamakan keunggulan kompetitif untuk mencapai tujuan Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Tugas Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
- 3.2 Penentuan Isu Strategis



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi diatur secara jelas bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Kebijakan Politik dan Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahaan ekomomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahaan ekomomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta



- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekomomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksaaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. Pelaksaaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- a). Kepala Badan.
- b). Sekretaris
 1. Subbag Program, Anggaran dan Keuangan.
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c). Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
 1. Sub. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
 2. Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama .
- d). Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
 1. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
 2. Sub. Bidang Penanganan Konflik.
- e). Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.
 1. Sub. Bidang Politik Dalam Negeri.
 2. Sub. Bidang Organisasi Masyarakat
- f). Jabatan Fungsional.

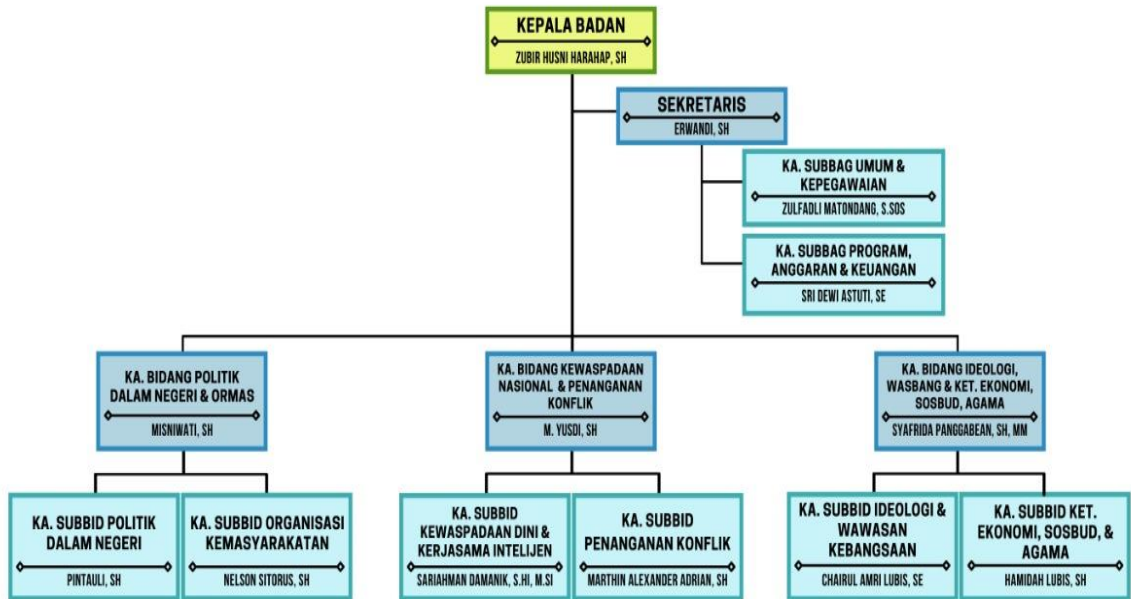


STRUKTUR ORGANISASI

SESUAI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi ditopang SDM dengan jumlah ASN sebanyak 20 orang yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing – masing sesuai dengan Job Description yang ada.

Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI- LAKI	12
2	PEREMPUAN	8
	JUMLAH	20



Klasifikasi Pendidikan Formal ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	2 orang
2	S1	13 orang
3	D3	2 orang
4	SLTA	3 orang
Jumlah		20 orang

Dalam Pembagian Tugas yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi yang menduduki posisi :

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Badan	1 orang	Eselon II
2.	Sekretaris	1 orang	Eselon III
3.	Ka.Bidang	3 orang	Eselon III
4.	Kasubbag / Kasubbid	8 orang	Eselon IV
5.	Jabatan Fungsional	7 orang	
Jumlah Keseluruhan		20 orang	

Susunan Golongan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	4 orang
2.	Golongan III	13 orang
3.	Golongan II	3 orang
Jumlah		20 orang



Sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi terdapat 1 buah gedung kantor yang beralamat di Jl. Gunung Agung Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, sebanyak 10 ruangan dan 4 toilet, untuk mobilitas terdapat 3 unit kendaraan dinas mobil dan 5 unit sepeda motor, untuk administrasi kantor terdapat 9 unit laptop dan 4 unit komputer, agar pegawai adem bekerja diruangan terdapat 10 unit AC di setiap ruangan, kemudian lemari untuk berkas serta meja dan kursi untuk setiap pegawai dan diruangan rapat.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi pada Renstra periode 2023 - 2026 dengan beberapa *indikator kinerja* sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

1. Persentase penurunan Unjuk Rasa dengan target IKK 10 %
2. Persentase konflik sara dengan target IKK 0 %
3. Persentase LSM aktif dengan target IKK 24,7%
4. Persentase partisipasi pemilih dengan target IKK 70 %
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target IKK 3,61%

Target Renstra, Penilaian Capaian dan Rasio Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi periode 2017 – 2022 untuk setiap tahunnya terlampir pada table T-C. 23. terlihat pelayanan atau indikator kinerja telah tercapai sesuai target Persentase penurunan Unjuk Rasa, Persentase konflik sara, Persentase LSM aktif, Persentase partisipasi pemilih, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor adanya kerjasama koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian bahwa pelayanan yang tidak sesuai dengan target adalah indikator Unjuk rasa pada tahun 2017 dan 2022 melebihi target, ini menunjukkan belum berhasilnya pelayanan karena semakin banyak unjuk rasa semakin tidak baik, faktornya masih ada masyarakat yang belum puas terhadap kinerja Pemerintah.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017 dan 2022 terlampir pada table T-C. 24. terlihat rasio antara anggaran dan realisasi dikata baik pada tahun 2018 sebesar 85 %, 2019 sebesar 86 % dan tahun 2020 sebesar 83 % sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 99 % Faktor yang mempengaruhinya adalah kelebihan penganggaran dan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.



Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penurunan Unjuk Rasa	-	-	6,25%	5%	5,26%	5,55%	5,88%	6,25%	1,8	49%	127,27%	10%	6,25%	3.60	9.32	25.40	170.07	100.00
2	Persentase konflik sara	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase LSM aktif	-	-	52%	48%	49%	50%	51%	52%	36,36%	58,8 %	41,18 %	24,7%	52%	75.75	120.00	82.36	48.43	100.00
4	Persentase partisipasi pemilih	-	-	70,00%	60,00%	65,00%	-	-	-	69,05%	81,57%	-	-	-	115.00	25.49	-	-	-
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	3,5	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,19	3,4	3,45	3,61	3,5	10.29	106.25	104.55	106.18	100.00



Table T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbang Politik
Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	324,550,000	325,590,000	325,520,000	327,598,200	103,206,200	324,550,000	325,590,000	325,520,000	327,598,200		1.00	1.00	1.00	1.00		1,323,899,440	1,303,258,200
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,016,525,100	1,016,525,100	1,016,525,100	1,016,525,100	1,016,166,500	230,945,000	295,336,000	161,400,000	1,016,525,100		0.23	0.29	0.16	1.00		4,269,333,700	1,704,206,100



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	51,200,000	54,000,000	51,200,000	46,101,600	49,924,800	51,200,000	54,000,000	51,200,000	46,101,600		1.00	1.00	1.00	1.00		212,486,560	202,501,600.
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	190,508,600	190,508,600	190,508,600	283,366,700	190,508,600	190,508,600	190,508,600	190,508,600	273,366,700		1.00	1.00	1.00	0.96		892,994,220	705,583,900.
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	432,550,000	420,400,000	419,290,400	522,622,600	538,761,400	432,550,000	420,400,000	419,290,400	522,622,600		1.00	1.00	1.00	1.00		1,902,615,280	1,552,821,600.
total	2,015,333,700	2,007,023,700	2,003,044,100	2,196,214,200	1,898,567,500	1,229,753,600	1,285,834,600	1,147,919,000	2,186,214,200		0.85	0.86	0.83	0.99		8,601,329,200	5,468,371,400



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

Dalam pengembangan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi menemukan beberapa tantangan, antara lain :

- a. Menipisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah
- c. Sensitifnya Idealisme yang mudah terpengaruh dan terprofokasi
- d. Melemahnya toleransi dalam hubungan sosial
- e. Meningkatnya potensi konflik dalam budaya sosial
- f. Pertumbuhan organisasi masyarakat, OKP dan LSM
- g. Perkembangan politik dan pemilihan umum
- h. Isu terorisme dan radikalisme masih kuat mewarnai kehidupan masyarakat dengan persepsi yang berbeda-beda.

Disamping tantangan terdapat juga peluang yang bisa menjadi kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi, antara lain :

- a. Adanya mitra kerja melalui Forum – Forum : FKUB, FKDM, FPK dan Adanya hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait lainnya
- b. Adanya komunikasi dan koordinasi antar Forkompinda
- c. Adanya keterbukaan informasi melalui media elektronik dan sosial media
- d. Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan
- e. Adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai serta peningkatan kualitas SDM organisasi melalui pendidikan dan atau pelatihan.



Telaah Terhadap RTRW dan KLHS

Faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari RTRW dan KLHS sebagai berikut :

Faktor-faktor Penghambat ;

- Menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Faktor-faktor Pendorong ;

- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara meliputi Koramil 13, Kodim 0204/Deliserdang di Kota Tebing Tinggi
- Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk mendukung tujuan dan sasaran Kota Tebing Tinggi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Forum – Forum : FKUB, FKDM, FPK dan dengan instansi terkait lainnya
- b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Forkompinda
- c. Meningkatkan informasi melalui media elektronik dan sosial media
- d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor yang memadai serta
- e. Mengoptimalkan kualitas SDM organisasi melalui pendidikan dan atau pelatihan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Tebing Tinggi

Tabel T-B.3.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Pemilihan Umum Serentak 2024 maka perlunya Pendidikan Politik Masyarakat selama 5 tahun baru terlaksana 2 kali	1. Perkembangan politik dan pemilihan umum
	2. Perubahan Peraturan dan Perkembangan Ormas maka perlu dilaksanakan dialog antar Ormas, OKP, dan LSM dengan Pemerintah yang selama 5 tahun baru terlaksana 2 kali	1. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah 2. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan 3. Pertumbuhan Ormas, OKP dan LSM
	3. Masih bannyaknya kasus Narkoba di masyarakat maka perlunya Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika selama 5 tahun hanya 1 kegiatan	1. Meningkatnya kasus narkoba 2. Masyarakat belum menyadari bahaya narkoba



Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3
	4. Kota Tebing Tinggi terdiri dari berbagai etnis, suku, ras dan agama, rawan konflik sara/konflik sosial tidak dapat diprediksinya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan maka Pentingnya Perlaksanaan rapat, monitoring, dan pelaporan Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah setiap tahunnya	1. Melemahnya toleransi dalam hubungan sosial yang dapat meningkatkan potensi konflik sosial 2. Demontrasi atau unjuk rasa akibat dari sensitifnya Idealisme yang mudah terpengaruh dan terprofokasi 3. Isutorisme dan radikalisme masih kuat mewarnai kehidupan masyarakat dengan persepsi yang berbeda-beda
	5. Menipisnya rasa cinta tanah air maka perlunya Pelatihan Wawasan Kebangsaan / Bela negara selama 5 tahun baru terlaksana 3 kali	1. Lunturnya nilai-nilai sosial budaya bangsa sehingga menipisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Urutan Isu Strategis

No.	Isu – Isu Strategis
1	Pemilihan Umum Serentak 2024
2	Perubahan Peraturan dan Perkembangan Ormas
3	Masih bannyaknya kasus Narkoba di masyarakat
4	Berbagai etnis, suku, ras dan agama, rawan konflik sara /konflik sosial tidak dapat diprediksinya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan
5	Menipisnya rasa cinta tanah air, Nilai-nilai sosial budaya bangsa dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD

Di dalam RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 mempunyai Tujuan dan Sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Tujuan RPD : Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif

Sasaran RPD: Meningkatnya Investasi

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 adalah

Tujuan RENSTRA: Terciptanya Kehidupan Berbangsa yang Demokratis dan Kondusif

Sasaran RENSTRA : Meningkatnya Pemahaman dan Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi di Masyarakat



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN RPD	TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Sasaran Meningkatnya Investasi	Terciptanya Kehidupan Berbangsa yang Demokratis dan Kondusif dan Sasaran Meningkatnya Pemahaman dan Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi di Masyarakat	Persentase penurunan Unjuk Rasa	11%	12%	13%	14%
			Persentase konflik sara	0%	0%	0%	0%
			Persentase LSM aktif	21%	22%	23%	26%
			Persentase partisipasi pemilih	-	70,%	-	-



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Penjaminan kondusifitas wilayah dan akses informasi layanan investasi.

Arah Kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Menciptakan kondisi wilayah yang tentram dan kondusif.



Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Kehidupan Berbangsa yang Demokratis dan Kondusif.	Meningkatnya Pemahaman dan Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi di Masyarakat	Penjaminan kondusifitas wilayah dan akses informasi layanan investasi.	Menciptakan kondisi wilayah yang tentram dan kondusif.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Prioritas utama dalam program Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Tebing Tinggi antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023 - 2026.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - 1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - 1.3.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu,
 - 1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,



- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
 - 2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,
 - 1.1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan,

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 3.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah,
 - 3.1.2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah,



3.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah,

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4.1.1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,

4.1.2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah,

5.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah,



6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

6.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

6.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

6.1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

6.1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

6.1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

6.1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik															
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Yang Terlaksana	90%	90%	3,442,000,000	90%	3,553,000,000	90%	3,663,000,000	90%	3,673,000,000	90%	3,673,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	10,000,000	8 dokumen	10,000,000	8 dokumen	10,000,000	8 dokumen	10,000,000	8 dokumen	10,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	10,000,000	8 laporan	10,000,000	8 laporan	10,000,000	8 laporan	10,000,000	8 laporan	10,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	2,700,000,000	1 dokumen	2,700,000,000	1 dokumen	2,800,000,000	1 dokumen	2,800,000,000	1 dokumen	2,800,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	2,700,000,000	23 orang/bulan	2,700,000,000	23 orang/bulan	2,800,000,000	23 orang/bulan	2,800,000,000	23 orang/bulan	2,800,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	270,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	1 Paket	1 Paket	38,000,000	1 Paket	38,000,000	1 Paket	38,000,000	1 Paket	38,000,000	1 Paket	38,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	55,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,000,000	1 Paket	7,000,000	1 Paket	7,000,000	1 Paket	7,000,000	1 Paket	7,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

			Undangan yang Disediakan													
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	160,000,000	12 laporan	160,000,000	12 laporan	160,000,000	12 laporan	160,000,000	12 laporan	160,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	13 unit	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	60,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Bulan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi	



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	116,000, 000	12 laporan	116,00 0,000	12 laporan	116,0 00,00 0	12 laporan	116,000, 000	12 lapora n	116,0 00,00 0	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	186,000, 000	12 bulan	297,00 0,000	12 bulan	307,0 00,00 0	12 bulan	317,000, 000	12 bulan	317,0 00,00 0	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	3 unit	75,000,0 00	3 unit	85,000 ,000	3 unit	85,00 0,000	3 unit	85,000,0 00	3 unit	85,00 0,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	60 unit	20,000,0 00	60 unit	30,000 ,000	60 unit	40,00 0,000	60 unit	50,000,0 00	60 unit	50,00 0,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 unit	1 unit	91,000,0 00	1 unit	91,000 ,000	1 unit	91,00 0,000	1 unit	91,000,0 00	1 unit	91,00 0,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penurunan Laporan Atas Isu Radikalisme Dan Terorisme Di Masyarakat	100%	100%	1,800,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	850,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	1,800,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	850,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 02 2.0101	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	250,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 02 2.0103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 orang	300,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
		8 01 02 2.0105	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	1 laporan	1,250,000,000	1 laporan	1,300,000,000	1 laporan	1,300,000,000	1 laporan	1,300,000,000	1 laporan	1,300,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Alokasi Dana Dari Partai Politik Untuk Pendidikan Politik	60%	60%	6.199.938.500	60%	21.789.938.500	60%	1.229.938.500	60%	1.229.938.500	100%	1.229.938.500	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala	12 bulan	12 bulan	6.199.938.500	12 bulan	21.789.938.500	12 bulan	1.229.938.500	12 bulan	1.229.938.500	12 bulan	1.229.938.500	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik													
	8 01 03 2.0101	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10 Dokumen	10 Dokumen	5,914,938,500	10 Dokumen	20.914,938,500	10 Dokumen	914,938,500	10 Dokumen	914,938,500	10 Dokumen	914,938,500	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

			Pemantauan Situasi Politik di Daerah	di Daerah yang Disusun												
		8 01 03 2.0103	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200Orang	1.000 Orang	215,000,000	1.000 Orang	775,000,000	1.000 Orang	215,000,000	1.000 Orang	215,000,000	1.000 Orang	215,000,000	



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 03 2.0105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan	1 laporan	70,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	22,6%	23%	100,000,000	24%	100,000,000	25%	100,000,000	26%	100,000,000	26%	100,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 04 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Dan Peningkatan Peran Aktif Ormas, Okp Dan Lsm	1 kali	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 04 2.0104	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	200 Orang	50,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

	8 01 04 2.0105	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Laporan Isu Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
	8 01 05 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum / Diskusi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 bulan	12 bulan	400,000,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	400,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 05 2.0103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	200 orang	200,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
		8 01 05 2.0105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 laporan	12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Deteksi Dini Konflik	8%	8%	765,000,000	8%	775,000,000	8%	780,000,000	8%	790,000,000	8%	790,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
		8 01 06 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Jumlah Bulan Fasilitasi Forum / Rapat Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	12 bulan	765,000,000	12 bulan	775,000,000	12 bulan	780,000,000	12 bulan	790,000,000	12 bulan	790,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
--	--	--------------------	--	--	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------------	--------------------



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	108,000,000	12 Dokumen	108,000,000	12 Dokumen	108,000,000	12 Dokumen	108,000,000	12 Dokumen	108,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
--	--	--------------------	--	---	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------------	--------------------



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13 Orang	13 Orang	100,000,000	13 Orang	100,000,000	13 Orang	100,000,000	13 Orang	100,000,000	13 Orang	100,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
--	--	--------------------	---	--	----------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	-------------------	--------------------



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24 Orang	24 Orang	78,000,000	24 Orang	78,000,000	24 Orang	78,000,000	24 Orang	78,000,000	24 Orang	78,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
--	--	--------------------	--	---	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	-------------------	--------------------



RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI

		8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	Badan Kesbang Pol	Kota Tebing Tinggi
--	--	--------------------	--	--	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------------	--------------------



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi antara lain :

1. Persentase Penurunan Unjuk Rasa
2. Persentase Konflik Sara
3. Persentase LSM aktif
4. Persentase Partisipasi Pemilih

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penurunan Unjuk Rasa	10%	11%	12%	13%	14%	14%
2	Persentase konflik sara	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Persentase LSM aktif	20,5%	21%	22%	23%	24%	24%
4	Persentase partisipasi pemilih	-	-	70%	-	-	70%



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi di perbuat, semoga maksud dan tujuan penyusunan ini dapat tercapai sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah secara sisitimatis.

Kemudian tanggap terhadap perubahan serta dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang memberikan dukungan agar semua program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, dan semoga di tahun 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan lebih baik lagi.

Tebing Tinggi, 28 Maret 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
KOTA TEBING TINGGI

ZUBIR HUSNI HARAHAHAP, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641225 198602 1 003